

MODEL E-PLANNING UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ahmad Haidar Mirza

Teknik Informatika Universitas Bina Darma
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12 Palembang
Email : haidarmirza@mail.binadarma.ac.id, haidarmirza@yahoo.com

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat pada sistem komputerisasi yang sudah merupakan tuntutan disegala bidang maka hampir semua unit/intansi/lembaga pemerintah berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam proses menunjang proses pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasilguna di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) agar pembangunan bisa dilaksanakan secara merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat, maka perlu dibangun dan dikembangkan suatu Sistem E-Planning yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah kabupaten OKU dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah kabupaten OKU untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas, serta mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi antara pusat dan daerah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengupayakan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien. Model E-Planning yang dirancang dan dibangun diharapkan akan memudahkan proses penyampaian input program perencanaan pembangunan mulai dari kecamatan, yaitu SKPD. Perancangan dan pengembangan Model E-Planning ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisa data, dengan mengikuti tahapan – tahapan dalam sistem siklus pengembangan sistem waterfall (SDLC).

Kata Kunci : E-Planning, OKU, Model, Sistem

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan yang berbasis TI dan internet (e-government) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kompleksnya urusan dan pelaku yang terlibat, menuntut pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e government Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang sangat tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pembangunan yang merata di wilayah kabupaten OKU. Hal itu disebabkan karena sulitnya pemerintah dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2008 dan belum ada keterkaitan substansi antar dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain guna merespon paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, misalnya dari top-down planning ke bottom-up planning, dari budaya petunjuk ke budaya partisipasi. Menurut Aziz (2012), proses penyusunan RKPD menunjukkan masih terdapat kompleksitas permasalahan. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah tahap penyusunan mulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forumSKPD, sampai musrenbang tingkat kota. Aziz (2012) menganalisa permasalahan perencanaan pembangunan dengan pendekatan soft systems methodology mengelompokkan kompleksitas tersebut dalam tiga tahap. Strukturisasi permasalahan, mendefinisikan sistem permasalahan dan mendefinisikan sistem permasalahan dan membangun model konseptual. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem komputerisasi yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dimulai dari perangkat pedesaan sampai kecamatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat sesuai